

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, maka wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Menguatnya tuntutan tersebut mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kerjanya kepada publik Soimah (2014). Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Suhaeti dan Suhendar, 2015).

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana (2010:96) dalam Nagor, dkk (2015). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Menurut Ihsanti (2014) kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi Sumber Daya Manusia mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati, dkk, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 59/2007 yang merupakan perubahan atas Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mendefinisikan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Nagor, dkk, 2015). Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10) dalam Nagor, dkk (2015), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi: akuntabilitas, value for money, kejujuran, transparansi, dan pengendalian. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Suhaeti dan Suhendar , 2015).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menurut PP RI No.71 tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah (Suhaeti dan Suhendar, 2015). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan demikian, SAP merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Nufus, 2015). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah diterima baik pusat maupun daerah. SAP digunakan dalam laporan keuangan untuk memahami informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor (BPK) (Mahlil dan Yahya, 2017).

Salah satu faktor penentu tinggi rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemahaman regulasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pemahaman regulasi merupakan pemahaman anggota atau pegawai tentang prosedur, peraturan dan kebijakan daerah. Pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan yang lebih transparan dan

akuntabel. Jika pemahaman regulasi atas PP 71 tahun 2010 rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (Tickell, 2010). Sehingga tinggi rendahnya tingkat pemahaman regulasi akan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan (Kartikasari, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara sumber daya manusia, penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah, implementasi standar akuntansi pemerintah dan pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah studi empiris pada BKD Kabupaten Boyolali. Alasan dipilihnya judul tersebut adalah untuk mengetahui seberapa baiknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Boyolali.

Penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) menyimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Karmila, dkk (2014) memberikan bukti empiris bahwa kapasitas SDM tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Nagor, dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Namun kenyataannya dalam hal

pengelolaan keuangan daerah masih ditemukan banyak kendala-kendala yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Nufus (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh atau hubungan positif dan signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fikri, dkk (2015) yang menunjukkan bahwa Penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah.

Penelitian Kiranayanti dan Erawati (2016) menunjukkan bahwa pemahaman atas regulasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan atau dalam hal ini adalah kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kartikasari (2012), Rahayu (2014), Dora (2014) dan Hariyanto (2014), karena penelitian tersebut belum menggunakan pemahaman regulasi PP 71 2010 dan belum menguji tentang pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan ketidakkonsistenan hasil yang dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil judul penelitian: **“Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemahaman Basis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BKD Kabupaten Boyolali)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan sebelumnya, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah implementasi standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah pemahaman basis akrual berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis implementasi standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk menganalisis pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, antara lain:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan akuntansi pada umumnya, dapat memberi tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan pengalaman penelitian dibidang pemerintahan tentang kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah.

3. Manfaat Praktis

Sebagai masukan dan informasi untuk mengambil kebijakan dalam hal peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini disusun secara sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini, terdapat penjelasan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, terdapat penjelasan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian atau model penelitian dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, terdapat jenis penelitian, desain penelitian, data dan sumber data, metode pengambilan data, variabel penulisan dan pengukurannya, serta metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, terdapat tentang hasil analisis yang menjadi objek dalam penelitian dan penjelasannya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini, terdapat simpulan atas hasil pembahasan analisa data penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.